

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis strategi Humas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham tentang keterbukaan informasi publik, maka penulis menyimpulkan beberapa hal seperti berikut ini:

1. Strategi Humas DJPP dalam mendukung sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui media sosial didasarkan pada penerapan model SOSTAC (*Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Actions, dan Control*) yang sistematis dan komprehensif. Langkah pertama dalam strategi ini adalah melakukan analisis situasi secara mendalam untuk memahami lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi penyebaran informasi publik. DJPP aktif mengelola dan mengembangkan sosialisasi peraturan perundang-undangan pada [peraturan.go.id](http://peraturan.go.id) melalui media sosial yang mana [peraturan.go.id](http://peraturan.go.id) sebagai pusat informasi resmi yang memberikan akses mudah kepada masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, DJPP menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk strategi penyebaran informasi mereka. Meskipun tidak selalu menggunakan metode SMART, tujuan Humas DJPP tetap fokus pada penyampaian informasi yang lengkap, benar, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Target audiens meliputi masyarakat luas, lembaga pemerintahan, praktisi hukum, dan pegawai kementerian. Strategi komunikasi yang efektif mencakup pemilihan platform media sosial yang tepat, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube, untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Pada tahap taktik, Humas DJPP menggunakan alat dan aplikasi seperti Canva untuk desain konten, WhatsApp untuk koordinasi, dan layanan pemendek URL seperti Bit.ly untuk memastikan distribusi informasi yang efisien dan menarik. Setiap konten yang dibuat melalui

proses verifikasi yang ketat untuk menjaga keakuratan dan daya tarik informasi. Langkah-langkah konkret termasuk pembuatan konten menarik, penjadwalan posting, penggunaan hashtag, dan interaksi dengan pengguna untuk memastikan keterlibatan audiens.

Pelaksanaan tindakan atau aksi sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan. Tim Humas DJPP menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan informasi yang telah diverifikasi, menjaga keakuratan dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Terakhir, tahap kontrol melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas strategi penyebaran informasi. Humas DJPP memantau indikator seperti jumlah informasi yang diproduksi dan umpan balik dari masyarakat untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, strategi Humas DJPP dalam mendukung sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui media sosial menekankan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan informasi publik. Dengan menggunakan model SOSTAC, Humas DJPP memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penyebaran informasi dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, tetapi juga mendukung peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Tantangan yang dihadapi Humas DJPP dalam melaksanakan strategi sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui media sosial dapat dianalisis melalui kerangka SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Meskipun Humas DJPP memiliki berbagai kekuatan dan peluang, terdapat juga sejumlah kelemahan dan ancaman yang perlu diperhatikan dan diatasi untuk mencapai efektivitas komunikasi yang optimal.

Kekuatan yang dimiliki Humas DJPP mencakup akses yang luas dan mendalam terhadap informasi hukum, serta kemampuan untuk memanfaatkan platform media sosial secara efektif seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Koordinasi yang intensif dengan tim teknis serta penggunaan alat dan aplikasi seperti Canva dan WhatsApp membantu memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan akurat dan menarik. Namun, kelemahan yang muncul adalah bahwa konten yang disajikan seringkali kompleks dan kurang menarik bagi audiens umum, yang mengakibatkan rendahnya tingkat engagement seperti likes, komentar, dan share. Selain itu, komunikasi yang bersifat satu arah menghambat kesempatan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan meningkatkan engagement dengan Masyarakat. Meskipun Humas DJPP memiliki peluang besar untuk meningkatkan jangkauan dan interaksi melalui pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia, mereka juga dihadapkan pada ancaman seperti rendahnya literasi digital dan hukum di kalangan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas tentang hukum mungkin kesulitan memahami kompleksitas informasi yang disampaikan. Selain itu, DJPP harus bersaing dengan berbagai sumber informasi lain yang seringkali lebih populer atau sensasional, yang mengarah pada risiko berkurangnya perhatian masyarakat terhadap informasi resmi yang disampaikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, DJPP perlu fokus pada penyederhanaan konten agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Peningkatan interaksi dua arah melalui media sosial juga penting untuk memperkuat engagement dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Selain itu, DJPP perlu memperkuat mekanisme pengumpulan masukan formal dari masyarakat untuk memastikan bahwa partisipasi publik dapat berjalan dengan lebih efektif. Penggunaan teknologi interaktif seperti live streaming, polling, dan Q&A dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan audiens dan memperluas pemahaman mereka tentang aturan-aturan hukum yang kompleks.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Humas DJPP mencakup penyajian konten yang lebih menarik dan mudah dipahami, peningkatan interaksi dua arah dengan masyarakat, serta memperkuat mekanisme partisipasi publik. Dengan mengatasi kelemahan dan ancaman ini, DJPP dapat meningkatkan efektivitas strategi komunikasinya, memperkuat hubungan dengan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui analisis strategi Humas DJPP dalam mendukung sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui media sosial. Oleh sebab itu, saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan metode kuantitatif khususnya pada topik mengenai dampak dari konten media sosial DJPP dengan pemahaman dari masyarakat. Selain itu penelitian selanjutnya dapat membahas topik sejauh mana pemahaman petugas Humas tentang tugas dan perannya dalam melakukan strategi Humas Pemerintah.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Setelah melakukan analisis strategi Humas DJPP melalui media sosial, terdapat beberapa saran yang dilakukan kepada Humas DJPP:

1. Humas DJPP perlu meningkatkan pelatihan dan pengembangan pembuatan konten visual dan analisis data untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.
2. Guna menjangkau target pasar yang lebih luas Humas DJPP perlu melakukan kolaborasi dari elemen marketing mix lainnya seperti memasang *Ads*, menentukan SEO, dan *digital marketing tools* lainnya.
3. Humas DJPP harus tetap responsif pada media sosial, memberikan tanggapan awal dan menjanjikan tindak lanjut selama jam kerja untuk menjaga kepercayaan publik.

### 5.2.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh peneliti saat menjalankan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Rentang waktu penelitian yang terbatas: Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang mungkin tidak mencakup perubahan strategi atau kebijakan terbaru yang diterapkan oleh Humas DJPP. Perubahan mendadak atau kebijakan baru yang muncul setelah periode penelitian mungkin tidak tercakup dalam analisis.
2. Fokus pada Satu Institusi: Studi kasus ini terbatas pada DJPP dan mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk instansi pemerintah lainnya yang memiliki struktur organisasi, sumber daya, dan audiens yang berbeda. Hasil penelitian ini mungkin lebih relevan secara spesifik untuk konteks DJPP dan tidak mencerminkan strategi komunikasi humas di instansi pemerintah lainnya.

